

PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR NEGERI PIYAMAN III KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PROBLEMS OF MANAGING IN CLUSIVE EDUCATION IN PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL PIYAMAN III WONOSARI SUB DISTRICT GUNUNGKIDUL COUNTRY

Oleh: Febriana Nur Umami, Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Febriana.umami@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan permasalahan dalam pengelolaan pendidikan inklusif dan upaya sekolah untuk mengatasi permasalahan pendidikan inklusif di SD N Piyaman III. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu: 1. Permasalahan dalam pengelolaan pendidikan inkluisf yakni: (a) manajemen sekolah belum maksimal (b) belum adanya guru pembimbing khusus, (c) belum adanya kurikulum khusus untuk anak berkebutuhan khusus, (d) dalam proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus masih kesulitan dalam pelajaran matematika, (e) tidak sesuai alat pembelajaran dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, (f) pengelolaan kerjasama dengan berbagai pihak belum baik. 2. Upaya untuk mengatasi permasalahan yakni: (a) perencanaan yaitu pembagian tugas yang diketahui oleh semua guru, (b) perencanaan yaitu mengikutsertakan guru kelas yang ditugasi menangani anak berkebutuhan khusus dalam pelatihan, (c) pengarahan yaitu menggunakan kurikulum yang dipakai sekolah dan untuk anak berkebutuhan khusus dengan menurunkan tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan dan karakteristinya, (d) pengarahan yaitu pemberian jam ke 0 untuk anak berkebutuhan khusus pelajaran matematika, (e) perencanaan yaitu pihak sekolah mengajukan kepada dinas pendidikan terkait alat pebelajaran yang di butuhkan sekolah, (f) perecanaan yaitu pembuatan jadwal rutin untuk pertemuan sekolah dengan orang tua peserta didik.

Kata kunci: *Permasalahan, Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus*

Abstract

This research is aimed at describing problems in managing inclusive education and school's endeavor in surmounting problems of inclusive education management in public elementary school Piyaman III. This is a descriptive qualitative research. The results of the research were: 1) problems of inclusive education management, those are: (a) school's management is not effective (b) no special counselor teacher, (c) no special curriculum for the disability students, (d) lack of learning kits for the disability students, (e) lack of facilities from learning kits until the classes for the disability students and normal students, (f) inefficient cooperation. 2)Attempts to cope with the problems: (a) planning in teacher's duty that should be known by all the teachers, (b) planning that is entrust the classroom teachers who have responsible, for the disability students in training or workshop (c)an instruction that is using curriculum that is conducted in school and is using a decreased level of difficulties for the disabilities,(d) an instruction to conduct an intensive mathematic class (jam ke-0) for the disabilities (e) planning that is submitting a proposal to the education authority consist of facilities' need list dealing with inclusive education management,, (f) planning that is to hold a routine meeting schedule between students' parents.

Keywords: Problems, Inclusive Education, Disability Students

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan manusia mampu untuk bertahan dan

berkembang. Mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi semua manusia tidak terkecuali untuk anak berkebutuhan khusus seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi : “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan warga negara yang memiliki kelainan fisik emosional mental intelektual dan/fisik sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Anak Berkebutuhan Khusus merupakan anak yang memiliki kekurangan atau keterbatasan karena cacat fisik, mental maupun social. Anak Berkebutuhan Khusus berhak memperoleh pendidikan yang baik yang dapat meningkatkan kemampuan serta potensi yang dimilikinya serta layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya. Layanan pendidikan yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus yaitu layanan pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan salah satu layanan untuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan suatu pendidikan yang memberikan peluang bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat masuk dan mendapatkan ilmu dalam sekolah reguler atau umum. Pendidikan inklusif menurut Mohammad Takdir Ilahi, (2013: 26) yaitu sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Selain itu, dalam Peraturan Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009, pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam

satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Dari paparan di atas dapat dimaknai yaitu dengan adanya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, maka memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan seperti anak normal lainnya, sehingga membantu mereka dalam membentuk manusia yang terdidik dan percaya diri. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan sebuah layanan pendidikan inklusif. Layanan pendidikan inklusif didirikan untuk memberikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, selain itu untuk menyetarakan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus dengan mendapatkan pembelajaran secara bersama-sama.

Berdasarkan pengamatan pada saat pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebelum penelitian di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul serta observasi di SD N Piyaman III ditemukan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di kabupaten Gunungkidul belum baik.

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif terdapat komponen yang saling terkait. Komponen satu dengan yang lain saling terkait agar mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tidak dapat berjalan dengan baik apabila komponen pendidikan yang ada tidak saling berhubungan. Salah satu komponen yang penting dalam pendidikan adalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik atau guru merupakan orang yang sangat berpengaruh terhadap ketercapainya tujuan suatu pendidikan. Selain menjadi pendidik, guru merupakan orang tua kedua dan orang yang paling dekat dengan murid ketika di sekolah. Peran

seorang pendidik yaitu memberikan teladan kepada peserta didik dan juga mengarahkan peserta didik sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki. Di dalam sekolah inklusif terdapat tiga kelompok guru yaitu guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pembimbing khusus.

Selain harus adanya guru, kurikulum yang ada pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kurikulum yang di pakai pada sekolah inklusif yaitu kurikulum yang bersifat fleksibel. Seperti yang dikatakan oleh Dedy Kustawan, (2013: 96) kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum yang berlaku disekolah umum, namun kurikulumnya perlu fleksibel atau disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, karena hambatan dan kemampuan yang dimilikinya bervariasi. Kurikulum fleksibel menurut Dedy Kustawan, (2012: 59) adalah kurikulum yang mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang kemampuan dengan cara eskalasi, duplikasi, modifikasi, omisi dan substitusi. Komponen pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada pada sekolah penyelenggara inklusif harus aksesibel, sarana dan prasarana di sekolah inklusif harus dapat memudahkan penggunaannya baik peserta didik normal ataupun peserta didik berkebutuhan khusus. komponen selanjutnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kerja sama. Kerjasama sekolah dengan lembaga lain harus ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dikarenakan dengan adanya kerja sama, maka proses penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik.

Pembelajaran dalam konsep pendidikan inklusif membutuhkan suatu strategi tersendiri, untuk peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan suatu strategi sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti yang dikatakan Dedy Kustawan, (2013: 133) bahwa proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik (metode, media, dan sumber belajar). Seorang guru dalam sekolah inklusif ditekankan pada kemampuannya dalam pengelolaan kelas, selain itu guru harus memiliki kompetensi mengelola pembelajaran serta pemahaman terhadap peserta didik yang mempunyai ragam perbedaan. Oleh karena itu, dalam sekolah inklusif dibutuhkan guru yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya, yang mampu menangani anak berkebutuhan khusus secara maksimal. Misalnya untuk guru pembimbing khusus berlatar belakang pendidikan luar biasa. Akan tetapi pada kenyataannya guru yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya sangat terbatas. Keterbatasan guru merupakan masalah utama dalam penyelenggaraan sebuah pendidikan. Hal tersebut merupakan permasalahan yang harus mendapatkan penanganan dari pihak sekolah maupun pemerintah kota agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak dan maksimal.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu manajemen sekolah. manajemen pendidikan inklusif menurut Ley Kekeh Marthan, (2007: 145) yaitu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan inklusif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan

evaluasi dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personel, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi harus di persiapkan secara matang sehingga tujuan pendidikan inklusif dapat tercapai.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas dapat diketahui bahwa terdapat begitu permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan permasalahan terkait manajemen sekolah, tenaga kependidikan, kurikulum, proses pembelajaran, sarana dan prasarana serta kerjasama dalam pengelolaan pendidikan inklusif serta upaya sekolah untuk menangani permasalahan terkait pengelolaan Pendidikan Inklusif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*). Menurut Suharsimi Arikunto, (2005: 234) penelitian deskriptif hanya bermaksud menggambarkan atau menerangkan gejala, tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Selain itu pendapat dari Hadari Nawawi (2002: 63), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek ataupun obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data. Penelitian ini dipilih oleh peneliti karena peneliti bermaksud

mendeskripsikan, menguraikan, mengidentifikasi dan menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD N Piyaman III Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian ini berlangsung, dan lokasi penelitian inilah yang mempengaruhi hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di SD N Piyaman III Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Lokasi tersebut dipilih karena terdapat permasalahan dalam pengelolaan pendidikan inklusif.

Penelitian tentang Permasalahan dalam Pengelolaan Pendidikan Inklusif di SD N Piyaman III Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu mulai bulan Februari hingga selesai pada bulan April 2016.

Target/Subjek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah SD N Piyaman III sebagai *key informan*, empat guru kelas yaitu guru kelas I, guru kelas II, guru kelas V dan guru kelas VI (guru yang pernah mendapatkan pelatihan tentang pendidikan inklusif) serta guru mata pelajaran yaitu guru olahraga sebagai informan.

Prosedur

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian diawali dengan pra penelitian yaitu dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan. Selanjutnya peneliti membuat proposal penelitian dan melakukan penelitian di lapangan. Penelitian di lapangan di lakukan

dengan wawancara kepala sekolah, guru kelas I, II, V, dan VI dan guru mata pelajaran olahraga SDN Piyaman III. Observasi kegiatan pembelajaran dan kondisi sarana prasarana, serta melakukan studi dokumentasi terhadap arsip terkait pendidikan inklusif. Setelah itu data yang di peroleh di analisis kemudian di hasilnya di dibandingkan dengan teori yang digunakan dan yang terakhir yaitu dibuat kesimpulan dan saran.

Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Macam data yang digunakan yaitu data hasil wawancara, data hasil observasi dan data hasil dokumentasi dari Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Instrumen alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah Suharsimi, (2013: 203). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, dan pedoman observasi. Pedoman wawancara yaitu untuk kepala SD N Piyaman III, guru kelas I, guru kelas II, guru kelas V, guru kelas VI serta guru mata pelajaran olahraga. Pedoman Observasi digunakan untuk melihat kondisi sarana prasarana dan proses belajar mengajar. Pedoman dokumentasi dimaksudkan untuk melihat arsip lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ada berbagai cara yaitu teknik wawancara. Dalam pegumpulan data menggunakan teknik wawancara peneliti memilih

informan yang paham mengenai apa yang akan peneliti teliti. Selain itu, peneliti melakukan kegiatan observasi untuk mengetahui keadaan lapangan yang sesungguhnya sekaligus untuk mengecek apakah benar data wawancara yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya melakukan studi dokumentasi pada beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian peneliti. Studi dokumen berguna untuk pendukung teknik yang lain

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, (2010: 335), kegiatan yang akan dilakukan dalam analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Apabila data yang telah terkumpul, maka lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol Suharsimi Arikunto (2010: 282). Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data kualitatif sehingga teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Data yang diperoleh dianalisis menurut langkah-langkah dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2015: 337-345):

Langkah pertama yaitu Reduksi data. Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data yang dilakukan yaitu memilih data-data penelitian dari hasil observasi dan wawancara berdasarkan tiap sumber, kemudian data tersebut dimasukkan dalam kategori sesuai fokus permasalahan yakni

permasalahan dan solusi sekolah mengatasi permasalahan pengelolaan pendidikan inklusif di SD N Piyaman III Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Langkah kedua yaitu Penyajian Data (*Data Display*). Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan memudahkan peneliti dalam langkah selanjutnya. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks dalam bentuk naratif. Data yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu permasalahan dan solusi dalam mengatasi masalah dalam pengelolaan pendidikan inklusif yang diperoleh dari berbagai sumber. Data terkait permasalahan yang disajikan yakni manajemen sekolah, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, proses pembelajaran dan kerjasama serta data terkait solusi sekolah untuk mengatasi permasalahan manajemen sekolah, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, proses pembelajaran dan kerjasama dalam pengelolaan pendidikan inklusif di SD N Piyaman III Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Langkah terakhir yaitu Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*). Setelah dilakukan pengumpulan data, pemilihan data dalam penyajian data, langkah berikutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini berupa deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. Deskripsi atau gambaran akhir yang didapatkan dari proses penelitian ini yaitu mengenai permasalahan dalam pengelolaan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar

Negeri Piyaman III Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian maka diperoleh hasil dan pembahasan sebagai berikut:

Permasalahan dalam pengelolaan pendidikan inklusif di SDN Piyaman III

Manajemen Sekolah

Manajemen sekolah yang digunakan di SD N Piyaman III masih seperti sekolah reguler. Manajemen yang ada di sekolah reguler dengan sekolah inklusif semestinya berbeda. Manajemen sekolah yang digunakan sekolah inklusif tetap harus berprespektif inklusif yang mengintegrasikan keperluan peserta didik berkebutuhan khusus secara proporsional. Manajemen sekolah dalam setting inklusif menurut Ley Kekeh Marthan, (2007: 145) yaitu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan inklusif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan evaluasi dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personel, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selain itu sesuai dengan Fungsi manajemen menurut John F. Mee dalam Ley Kekeh Marthan, (2007: 8) yaitu perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*Motivating*), dan pengawasan (*Controlling*). Dalam pengelolaan pendidikan inklusif manajemen harus harus dikelola dengan baik agar proses pendidikan yang terjadi dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan yang ada di SD N Piyaman III. Di SD N Piyaman III belum bisa memaksimalkan personelnnya yaitu tenaga

kependidikan dalam hal perencanaan manajemen sekolah. selain itu untuk pengorganisasian yang ada di SD N Piyaman III, kepala sekolah sudah memilih dan memilah guru dengan masing-masing tugasnya akan tetapi pada kenyataannya belum dapat berjalan sesuai dengan rencana, pengarahan yang dilakukan oleh kepala sekolah kadang malah menjadikan guru kebingungan dalam melaksanakan tugasnya, guru masih salah tangap atas pengarahan yang diberikan. Selain itu kepala sekolah dalam pengawasan program sekolah ataupun kegiatan sekolah masih belum menyeluruh karena keterbatasan waktu ataupun kesibukan yang bersangkutan. Dalam hal ini, manajemen sekolah di SD N Piyaman III belum efektif dan efisien karena kepala sekolah belum bisa memaksimalkan partisipasi dari sumber daya yang ada di sekolah.

Tenaga kependidikan

Permasalahan yang terjadi di SDN Piyaman III terkait Tenaga kependidikan khususnya guru pembimbing khusus dan guru kelas. Permasalahan yang dimaksud dalam hal ini yaitu belum adanya guru pembimbing khusus, hal ini dikarenakan pihak sekolah tidak dapat merekrut guru pembimbing khusus karena keterbatasan dana. Selain itu dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Gunungkidul sudah memberikan informasi mengenai guru pembimbing khusus yang akan membantu setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif akan tetapi sampai sekarang belum ada guru pembimbing khusus yang datang ke sekolah serta setelah kepala sekolah mencari informasi ke sekolah luar biasa mengenai guru pembimbing khusus ternyata sekolah luar biasa sendiri masih kekurangan guru. Permasalahan lain terkait tenaga pendidik yaitu kurang kompetennya guru kelas yang diberikan

tugas untuk menangani anak berkebutuhan khusus seperti guru masih kesulitan dalam memberikan pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus tuna grahita, guru harus sabar dalam menerangkan setiap pembelajaran yang diberikan. Kurang kompetennya guru kelas yang ditugasi menangani anak berkebutuhan khusus tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah pasal 41 PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan dalam Dedy Kustawan, (2013: 128) bahwa : “setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus”. Dalam pengelolaan pendidikan inklusif sebaiknya di siapkan secara matang, akan tetapi di SD N Piyaman III, belum ada persiapan yang matang dalam pelaksanaan pendidikan inklusif menyangkut kualifikasi dan kompeten tenaga kependidikannya. Guru yang ada di SDN Piyaman III merupakan guru umum yang berlatar belakang pendidikan guru sekolah dasar, sehingga dalam pelayanan pendidikan khusus belum begitu maksimal. Guru yang ada di sekolah belum begitu memahami ilmu terkait keinklusion, keterbatasan guru kelas dalam pendampingan anak berkebutuhan khusus serta belum adanya guru pembimbing khusus untuk anak berkebutuhan khusus menjadikan pelayanan sekolah terkait pendidikan inklusif belum efektif. Guru umum yang ada di SDN Piyaman III yang diberikan tugas untuk menangani anak berkebutuhan khusus adalah guru yang pernah mendapatkan pelatihan tentang pendidikan inklusif yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Hal ini sesuai dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 12 ayat 3 yang berbunyi: “apabila guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pada sekolah atau madrasah yang bersangkutan, pememrintah Kabupaten dapat meminta bantuan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) atau pusat sumber atau lembaga lain untuk membantu pengelolaan pendidikan inklusif di sekolah atau madrasah yang bersangkutan”. Namun, pelatihan yang didapat oleh guru hanya sekedar ilmu dasar tentang pendidikan inklusif sehingga guru masih kesulitan dalam menangani anak berkebutuhan khusus bahkan guru masih kesulitan dalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus, padahal menurut Dedy Kustawan, (2013: 79) setiap guru harus memiliki kemampuan mengidentifikasi peserta didik atau calon peserta didik untuk mengetahui kondisi semua peserta didik dan lebih fokus lagi mengetahui ada tidaknya peserta didik berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Seorang guru dalam setting inklusif seperti yang dikatakan Mudjito, dkk, (2012: 54) bahwa kompetensi guru Inklusif adalah kemampuan guru untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus, seperti menyusun instrumen assesmen pendidikan khusus. akan tetapi guru yang ada di SDN Piyaman III belum kompeten karena latar belakang bukan pendidikan luar biasa.

Kurikulum

Permasalahan kurikulum di SDN Piyaman III dalam pengelolaan pendidikan inklusif yaitu belum adanya kurikulum khusus untuk anak berkebutuhan khusus sehingga dalam hal ini kurikulum yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus tunadaksa, tunagrahita

ringan, lamban belajar dan kesulitan belajar hanya dengan menurunkan tingkat kesulitan dengan memodifikasi kurikulum induk yang dipakai di sekolah. belum adanya kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus dikarenakan guru di sekolah masih kesulitan dalam membuat kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus bahkan guru yang sudah mengikuti pelatihanpun masih kesulitan meskipun di pelatihan sudah di ajarkan cara membuat kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus, pada saat praktek ketika di pelatihan guru tidak kesulitan akan tetapi pada saat pembuatan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah masih kesulitan. Kurikulum anak berkebutuhan khusus yang di pakai di SD N Piyaman III yaitu dengan menggunakan kurikulum anak normal yang tingkat kesulitannya diturunkan disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik masing-masing anak berkebutuhan khusus, misalnya jika KKM untuk anak normal 75 maka untuk anak berkebutuhan juga 75 akan tetapi tingkat kesulitan diturunkan. seharusnya kurikulum yang dipakai untuk pendidikan inklusif harus tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta jenis ketunaan anak berkebutuhan khusus, akan tetapi hal tersebut sulit diterapkan di SDN Piyaman III dikarenakan guru kesulitan dalam pembuatan kurikulum. Menurut Dedy Kustawan, (2013: 130) tugas guru pembimbing khusus (GPK), Memberikan bantuan dalam pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibilitas. Selain itu Budiyanto (2009:13) mengatakan bahwa guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi. Guru SDN Piyaman III tidak ada guru pembimbing khusus sehingga tidak ada guru yang membantu dalam pembuatan kurikulum. Kurikulum yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan jenis anak berkebutuhan yang ada di sekolah tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Dedy Kustawan, (2012: 59) yaitu kurikulum yang digunakan dalam pengelolaan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah pada biasanya, namun kurikulumnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, karena hambatan dan kemampuan yang dimiliki peserta didik yang ada di sekolah penyelenggara inklusif berbeda-beda atau bervariasi. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif seharusnya dipersiapkan secara matang agar tujuan dapat tercapai secara maksimal.

Sarana dan Prasarana

Permasalahan sarana prasana dalam pengelolaan pendidikan inklusif di SDN Piyaman III yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus. Sarana prasana yang ada di sekolah masih sama seperti sarana prasarana yang digunakan oleh sekolah reguler. Kurangnya sarana dan prasana di sekolah antara lain alat dan media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, selain itu aksesibilitas untuk anak berkebutuhan khusus, aksesibilitas baru sebatas lantai ulir dan pegangan untuk anak Tunanetra. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di SD N Piyaman III karena keterbatasan dana untuk membeli sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah, untuk alat dan media yang digunakan anak berkebutuhan khusus harganya mahal, selain itu sekolah sudah berusaha untuk mengajukan

sarana dan prasarana yang dibutuhkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, akan tetapi belum ditanggapi serta dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul sudah memberikan alat pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus dengan sistem *droping* sehingga alat pembelajaran yang diterima sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, misalnya di sekolah ada papan catur, tongkat lipat, peta timbul Indonesia, peraga jam, bola kaki bunyi untuk anak tunanetra padahal di sekolah tidak ada anak berkebutuhan khusus tunanetra. Sarana dan prasarana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus aksesibel bagi semua peserta didik khususnya peserta didik yang memiliki hambatan penglihatan, hambatan fisik, dan fungsi gerak. Alat pembelajaran seperti alat peraga sangat diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif karena dapat membantu pemahaman anak berkebutuhan khusus. Di SDN Piyaman III, guru masih kesulitan dalam menentukan alat peraga yang bisa digunakan untuk anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolahnya sehingga dalam proses pembelajaran guru hanya menggunakan contoh konkret untuk memberikan pengajaran kepada anak berkebutuhan khusus, hal itu diterapkan kepada anak berkebutuhan khusus tunagrahita, lamban belajar dan kesulitan belajar. Alat peraga yang ada sebaiknya disesuaikan dengan jenis ketunaan masing-masing anak berkebutuhan khusus yang ada di setiap sekolah, akan tetapi untuk SDN Piyaman III sendiri alat peraga yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Proses Pembelajaran

Permasalahan dalam pengelolaan pendidikan inklusif di SDN Piyaman III terkait proses pembelajaran yaitu belum maksimalnya penanganan untuk anak berkebutuhan khusus. guru dalam memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus belum maksimal dikarenakan guru tidak berlatar belakang pendidikan luar biasa sehingga anak berkebutuhan khusus belum ditangani sesuai dengan kebutuhannya dan tidak dapat menerima pelajaran dengan baik. Selain itu karena fasilitas atau alat pembelajaran yang masih kurang sehingga anak berkebutuhan khusus tidak dapat ditangani dengan baik dan kesusahan dalam menangkap materi. Alat yang ada di sekolah hanya diperuntukkan anak berkebutuhan khusus tunanetra, sedangkan di sekolah ini tidak ada untuk anak berkebutuhan khusus tunanetra. Proses pembelajaran untuk anak normal juga terkendala media pembelajaran seperti LCD, selain itu fasilitas seperti meja dan kursi juga ada beberapa yang rusak terutama di kelas III dan IV. Hal tersebut mengakibatkan anak tidak nyaman berada di dalam kelas dan tidak konsen dalam mengikuti pelajaran. Pembelajaran dengan menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal memang pembelajaran untuk pendidikan inklusif akan tetapi pada kenyataannya malah menjadikan kelas rame dan membuat guru kualahan dalam menangani karena guru yang ada di SDN Piyaman III hanya guru kelas yang merangkap sebagai guru pembimbing khusus sehingga guru masih bingung dalam menangani anak berkebutuhan khusus. setidaknya jika ada guru pembimbing khusus yang datang kesekolah dan memberikan arahan atau bantuan penanangan kepada guru kelas maka

guru tidak terlalu kesulitan dalam menganagi anak berkebutuhan khusus, karena menurut Budiyanto, (2009: 20), salah satu tugas guru pembimbing khusus yaitu melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada saat kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi. Padahal di SDN Piyaman III tidak ada guru pembimbing khusus sehingga yang memberikan pendampingan adalah guru kelas sehingga bobot kerjanya bertambah dan menjadikan proses pembelajaran yang terjadi tidak efektif karena guru harus membagi dua fokus kepada anak berkebutuhan khusus dan kepada anak normal.

Kerjasama

Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan pendidikan inklusif di SDN Piyaman III berkaitan dengan kerja sama yaitu kerjasama yang terjalin belum maksimal. kerja sama yang terjadi hanya sebatas pemberian informasi. Kerja sama yang terjalin di SD N Piyaman III yaitu kerja sama dengan Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Sekolah Luar Biasa Wonosari, dan orang tua murid. Permasalahan terkait kerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Gunungkidul yaitu kerjasama yang terjalin hanya bersifat pasif, Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga Gunungkidul mengundang beberapa guru untuk diikutkan pelatihan ataupun *workshop* terkait pendidikan inklusif. Pada saat sekolah mengajukan mengenai guru pembimbing khusus, pihak Dinas sudah memberikan arahan bahwa akan ada guru dari SLB yang datang sebagai guru pembimbing khusus ke sekolah, akan tetapi sampai sekarang pada kenyataannya belum ada guru dari Sekolah Luar Biasa yang datang ke sekolah. sedangkan

untuk masalah perekrutan sekolah belum bisa karena masih terkendala oleh dana. Selain itu kerja sama dengan Sekolah luar Biasa Wonosari, kerja sama yang terjadi antara guru SLB dengan sekolah terkait dengan guru pembimbing khusus hanya dengan pemberian informasi mengenai kesulitan apa yang dirasakan oleh guru sekolah dalam menangani anak berkebutuhan khusus, tidak adanya tindakan dari guru SLB untuk datang ke sekolah dan melihat permasalahan yang terjadi. Selain itu kerja sama untuk asesmen anak berkebutuhan khusus, pihak sekolah mengasesmen peserta didiknya di Sekolah Luar Biasa Wonosari. Permasalahan kerjasama dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif Kecamatan Wonosari belum maksimal, hanya sebatas tau sekolah mana yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif selain itu hanya sebatas tukar informasi terkait alat pembelajaran yang di *droping* oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Oleh karena itu dalam pengelolaan pendidikan inklusif di SDN Piyaman III ini belum efektif.

Upaya Sekolah untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pendidikan inklusif di SDN Piyaman III

Piyaman III

Tabel 1. Upaya Sekolah untuk Mengatasi Permasalahan dalam Pengelolaan Pendidikan Inklusif di SDN Piyaman III

No	Permasalahan	Upaya Sekolah
1.	Manajemen Sekolah	Perencanaan, pengarahannya, pengawasan: Pembagian Tugas
2.	Permasalahan Tenaga Kependidikan	Pengorganisasian: memilih guru kelas sebagai pengganti guru pembimbing khusus Pengarahannya: mengikutkan guru kelas dalam pelatihan atau workshop.
3.	Permasalahan Kurikulum	Pengarahannya: Memanfaatkan kurikulum yang dipakai secara umum dan instruksi pembuatan kurikulum modifikasi untuk anak berkebutuhan khusus.
4.	Permasalahan Sarana dan Prasarana	Perencanaan: Pengajuan sarana prasaran ke dinas pendidikan setempat Pengarahannya: memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah.
5.	Permasalahan Pembelajaran	Perencanaan dan pengarahannya: Instruksi pemberian jam ke 0 pemberian tambahan jam
6.	Permasalahan kerja sama	Perencanaan: Penjadwalan rutin pertemuan dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan sekolah dengan orang tua serta mengundang motivator.

Upaya permasalahan Manajemen Sekolah

Perencanaan: Kepala sekolah menentukan kebutuhan dan membagi setiap tugas kepada masing-masing guru agar guru mampu bertanggung jawab dan kepala sekolah dapat menilai kinerja guru dengan mudah.

Upaya permasalahan tenaga kependidikan

Pengorganisasian: kepala sekolah memilih guru yang mempunyai kompetensi di bidang pendidikan inklusif yaitu dengan menugaskan guru kelas untuk merangkap menjadi guru pembimbing khusus untuk anak berkebutuhan khusus.

Pengarahan: kepala sekolah memberikan arahan kepada guru kelas yang ditugasi merangkap menjadi guru pembimbing khusus diikutkan dalam pelatihan atau workshop mengenai pendidikan inklusif. Upaya ini dianggap paling efektif karena jika sekolah merekrut guru pembimbing khusus, sekolah tidak sanggup dalam hal pengajian karena di sekolah sudah ada 6 tenaga kependidikan yang honorer.

Upaya permasalahan kurikulum

Pengarahan: Kepala sekolah memberikan arahan kepada guru yang menangani anak berkebutuhan khusus mengenai kurikulum modifikasi untuk anak berkebutuhan khusus, akan tetapi guru masih kesulitan dalam membuat kurikulum modifikasi karena tidak ada guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa, meskipun waktu pelatihan sudah dipelajari cara membuat kurikulum modifikasi, selain itu belum adanya guru yang membantu dalam pembuatan kurikulum. Upaya yang dilakukan sekolah hanya dengan menggunakan kurikulum yang dipakai sekolah, sedangkan untuk anak berkebutuhan khusus yang ada di SD N Piyaman III dengan menurunkan tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik anak berkebutuhan khusus.

Upaya permasalahan sarana dan prasarana

Perencanaan: Kepala sekolah menentukan kebutuhan sarana dan prasarana untuk sekolah inklusif setelah itu kepala sekolah mengajukan ke Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul untuk ditindaklanjuti dalam pengadaannya selanjutnya menunggu konfirmasi dari pihak Dinas. Hal ini digunakan untuk menangani kurangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam pengelolaan pendidikan inklusif.

Pengarahan: kepala sekolah memberikan arahan agar pihak sekolah memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. misalnya ketika proses pembeajaran matematika untuk anak berkebutuhan khusus, mereka kesulitan menerima pelajaran tersebut maka guru memberikan penjelasan dengan mengambil batu yang ada di sekolah untuk media pembelajaran. Upaya ini sudah dianggap paling efektif karena dana untuk sarana prasarana tidak mencukupi jika untuk pembaruan sarana dan prasarana.

Upaya permasalahan proses pembelajaran

Perencanaan: Kepala sekolah mengadakan rapat dengan semua guru yang menangani anak berkebutuhan khusus untuk memahas terkait permasalahan dalam proses pembelajaran dan mendapatkan mufakat bahwa upaya untuk permasalahan proses pembelajaran yang dilakukan sekolah yaitu dengan memberikan jam ke 0 untuk anak berkebutuhan khusus. jam ke 0 ini diisi mata pelajaran matematika karena anak berkebutuhan khusus yang ada di SDN Piyaman III cenderung sulit menerima pelajaran matematika.

Pengarahan: Kepala sekolah memberikan arahan kepada guru terkait permasalahan dalam proses pembelajaran untuk peserta didik yang kesulitan dalam menangkap pembelajaran yaitu dengan

diberikan jam tambahan sepulang sekolah jika ada peserta didik normal maupaun berkebutuhan khusus yang belum memahami pelajaran. Dalam proses pembelajaran untuk jam tambahan anak berkebutuhan khusus dipisah dengan anak normal. Anak berkebutuhan khusus dengan guru kelas VI dan anak normal dengan guru kelas V. Upaya ini sudah dianggap paling efektif oleh guru karena tidak adanya alat pembelejaran yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus.

Upaya Permasalahan kerja sama

Perencanaan: kepala sekolah mengadakan rapat dengan semua guru terkait permasalahan kerjasama, dalam rapat diambil keputusan bahwa upaya sekolah untuk mengatasi permasalahan mengenai kerja sama yaitu dengan pembuatan jadwal rutin untuk pertemuan dengan orang tua untuk menginformasikan perkembangan anak mereka, dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif kecamatan Wonosari untuk berbagi informasi terkait pengelolaan pendidikan inklusif serta mengundang motivator guna memberikan motivasi kepada orang tua sekaligus kepada peserta didik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan Penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan permasalahan dalam pengelolaan pendidikan inklusif di SDN Piyaman III dapat disimpulkan berbagai permasalahannya sebagai berikut:

Permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Piyaman III sebagai berikut:

Permasalahan manajemen sekolah: 1) perencanaan yang dilakukan belum melibatkan semua guru, pegawai TU, admin sekolah serta komite sekolah, 2) pengorganisasian: pembagian tugas terkait penanganan anak berkebutuhan khusus ke guru kelas yang sudah pernah mengikuti pelatihan belum terlaksana dengan baik, guru masih kesulitan mengerjakan tugasnya 3) pengarahan: pengarahan kepala sekolah masih belum ditanggapi dengan baik, masih ada guru yang lambat dalam menanggapi arahan, 4) pengawasan: pengawasan kepala sekolah terkait program atau kegiatan belum menyeluruh, hanya sebatas bertanya tentang keterlaksanaan program saja.

Permasalahan tenaga kependidikan: 1) belum adanya guru pembimbing khusus, 2) guru

kelas yang ditugasi untuk menangani anak berkebutuhan khusus masih kesulitan dalam menanganinya

Permasalahan Kurikulum: 1) belum adanya kurikulum khusus untuk anak berkebutuhan khusus di SD N Piyaman III, 2) belum adanya guru yang dapat membantu pembuatan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus.

Permasalahan Proses pembelajaran : 1) anak berkebutuhan khusus masih kesulitan dalam pelajaran matematika, 2) kurangnya kemampuan guru pada saat menangani anak berkebutuhan khusus, guru belum bisa mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus.

Permasalahan Sarana dan Prasarana : 1) masih kurangnya media pembelajaran maupun kelas untuk anak berkebutuhan khusus maupun untuk anak normal, 2) tidak sesuainya alat pembelajaran dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Permasalahan Kerjasama : 1) kerja sama yang terjadi belum maksimal, kerjasama pasif dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, pihak sekolah hanya mengikutkan guru dalam pelatihan yang diadakan , 2) belum adanya pengelolaan yang baik dengan berbagai pihak.

Upaya sekolah untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pendidikan inklusif di SDN Piyaman III

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait upaya sekolah dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pendidikan inklusif di SDN Piyaman III sebagai berikut Manajemen Sekolah: dengan pembagian tugas yang dilakukan oleh kepala sekolah

Tenaga kependidikan : 1) menugaskan guru kelas untuk merangkap menjadi guru pembimbing khusus untuk anak berkebutuhan khusus, 2) untuk guru kelas yang ditugasi merangkap menjadi guru pembimbing khusus diikutkan dalam pelatihan atau waorkshop mengenai pendidikan inklusif di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

Kurikulum : Upaya yang dilakukan sekolah hanya dengan menggunakan kurikulum yang dipakai sekolah dan untuk anak berkebutuhan khusus tunagrahita, lamban belajar dan kesulitan belajar dengan menurunkan tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya.

Sarana prasarana : 1) pihak sekolah mengajukan kepada dinas pendidikan terkait kebutuhan yang di perlukan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Proses pembelajaran : 1) pemberian jam ke 0 untuk anak berkebutuhan khusus. jam ke 0 ini diisi mata pelajaran matematika, 2) pemberian jam tambahan untuk semua peserta didik baik yang normal ataupun anak berkebutuhan khusus yang dalam proses pembelajaran yang diberikan kurang paham.

Kerjasama : 1) pembuatan jadwal rutin sekolah untuk pertemuan dengan orang tua dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif kecamatan Wonosari, 2) Mengundang motivator guna memberikan motivasi kepada orang tua sekaligus kepada peserta didik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi sekolah: a) Perlunya persiapan yang matang untuk melaksanakan pendidikan inklusif, b) Perlunya mensosialisasikan tentang pengelolaan pendidikan inklusif kesemua warga sekolah, c) Mengikutsertakan guru kelas, guru mata pelajaran yang belum mengikuti pelatihan dalam berbagai pelatihan terkait pendidikan inklusif, d) Perlunya menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya pendidikan inklusif, e) Perlunya meningkatkan kerjasama yang baik demi tercapainya tujuan pendidikan inklusif
2. Bagi Dinas Pendidikan: a) perlunya menyediakan guru pembimbing khusus yang akan ditempatkan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, b) perlunya mengadakan pelatihan atau workshop terkait pendidikan inklusif bagi semua guru dan kepala sekolah untuk sekolah penyelenggara inklusif, c) perlunya melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto. 2005. *Pengantar Pendidikan Inklusif berbasis Budaya Lokal*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan.

Dedy Kustawan. 2012. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta timur: PT Luxima Metro Media

Dedy Kustawan dan Yani Meimulyani. 2013. *Mengenal pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus serta implementasinya*. Jakarta Timur: PT Luxima Metro Media.

Hadari Nawawi. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ley Kekeh Marthan. 2007. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketengaan.

Mohammad Takdir Ilahi. 2013. *Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Mudjito, dkk. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose Media Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 ayat 2 tentang Pendidikan Inklusif.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pendidikan Inklusif.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-undang RI No.14 Tahun 2005 ketentuan umum pasal 1 ayat 1, tentang Guru dan Dosen.